

**Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI
Pada Program Studi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura****Aflahah***Fakultas Tarbiyah LAIN Madura**aflahab84@gmail.com***Abstrak:**

Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura telah menerapkan kurikulum berbasis KKNI sejak tahun 2016, dan sampai sekarang penerapannya masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data berupa fakta hasil observasi di lingkungan IAIN Madura, ditambah hasil wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Prodi TBIN melakukan beberapa tahapan seperti melakukan peninjauan ulang dan memperbaiki kurikulum, melakukan studi wawasan ke beberapa perguruan tinggi, dan mengadakan workshop dan program pendampingan. 2) Implementasi kurikulum bisa dikatakan berjalan hampir sebagaimana mestinya. 3) Evaluasi implementasi kurikulum masih pada konteks kurikulum sebagai sebuah pembelajaran dan pengajaran saja, yaitu hanya fokus pada penyesuaian mata kuliah dengan capaian pembelajaran. 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya: lemahnya penggunaan media pembelajaran IT, kurangnya pendampingan ahli KKNI, sarana dan Prasarana kurang mendukung, dan juga komitmen bersama semua pihak termasuk dosen prodi dan mahasiswa. Untuk itu seluruh pihak seharusnya bisa terus meningkatkan kualitas kurikulum dan mengembangkan perangkat kurikulum berbasis KKNI dengan baik.

(TBIN Program of IAIN Madura have implemented KKNI based curriculum since 2016 but it is still far from maximal. This study is intended to describe the planning, implementation, evaluation, and the factors that affect the implementation of KKNI based curriculum on TBIN Program. This is descriptive qualitative research. The data sources were field observation results, complete with the data from interviews and documentation. Data analysis involved data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. The research results were 1) TBIN program did several stages such as reviewing and 'fixing' the curriculum, doing insight studies to some Universities, and held a workshop and mentoring program. 2) The implementation of the curriculum can be assumed to be almost as expected. 3) The evaluation of curriculum implementation revealed that it is still in the context of the curriculum as learning and teaching, it only focused on course adjustment with the learning outcomes. 4) The factors influenced its implementation was linguistics and literature's weak of the lecturers, lack of mastering IT-based learning, the budget was still low, the lack of mentoring experts of KKNI, facilities, and infrastructure is less support. Therefore, the entire parties should continue to improve the quality of the curriculum and develop KKNI based curriculum properly.)

Kata Kunci:

Kurikulum; KKNI; Tadris Bahasa Indonesia

Pendahuluan

Era Globalisasi, bersamaan juga dengan berkembangnya tren terbaru dunia industri atau yang dikenal dengan istilah industri 4.0 dimana teknologi berkembang dengan pesat dan cepat, menyaratkan manusia memiliki kemampuan berpikir yang memadai. PTKI, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi-generasi yang siap bersaing baik nasional maupun internasional. Tuntutan dunia internasional terhadap lulusan perguruan tinggi mengharuskan perguruan tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas dari sistem pendidikan mereka, mulai dari sistem perekrutannya, materi pembelajarannya, fasilitasnya, dan juga kurikulum yang dimuat di dalamnya. Itulah mengapa perubahan kurikulum pada perguruan tinggi Islam sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan perubahan pola pikir manusia seiring dengan tuntutan zaman.

Dasar pemikiran di atas menghasilkan sebuah ikhtiar dari pemerintah untuk merancang sebuah acuan kurikulum perguruan tinggi dengan tujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja.¹

Lahirilah Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan tujuan utama untuk mendekatkan, mengintegrasikan, dan menyetarakan antara dunia pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja. Meskipun kebijakan pemerintah tentang penerapan KKNI di perguruan tinggi tidak turut serta memberikan dampak langsung terhadap perubahan pola kurikulum di setiap program studi namun penyesuaian materi pembelajaran (*contents*) sudah mulai diajarkan kepada mahasiswa.²

Penerapan kurikulum yang mengacu KKNI sesungguhnya memperjelas seperti apa profil lulusan dari setiap Prodi dan learning outcomes (capaian pembelajaran) seperti apa yang didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan, sehingga penyusunan kurikulum benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan setiap Prodi³. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan akan memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan secara sistematis sesuai dengan KKNI pada masing-masing prodi tersebut⁴.

Kurikulum berbasis KKNI dimaksudkan juga agar dapat mengurangi kesenjangan antara kompetensi kebutuhan dunia kerja dengan mutu lulusan suatu lembaga pendidikan. Sinkronisasi hal tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara efektif dan sesuai dengan bidangnya masing-masing serta memiliki kompetensi yang diharapkan. Dampak dari penerapan kurikulum berbasis KKNI adalah masyarakat Indonesia harus memiliki sikap dan tata nilai keindonesiaan, kemampuan, pengetahuan sekaligus mendapat tanggung jawab dan hak atas capaian pembelajaran yang dilakukannya sesuai dengan level dalam KKNI.⁵ Sedangkan dari segi penguatan kelembagaan, kurikulum berbasis KKNI berguna untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi dosen dan

¹ Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SN-Dikti* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018). 1.

² Fauzan and Asep Ediana Latip, "Curriculum Readiness and Program Evaluation in Implementing Indonesian National Qualifications Framework Curriculum (KKNI)," *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society* 2, no. 2 (2015): 191–203, <http://dxdoi.org/10.15408/tjems.v2i2.3179>.

³ Nur Hasanah, "Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI (Studi Kasus Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Ambon)," *Fikratama* 6, no. 2 (2014), <http://dxdoi.org/10.19109/jip.v3i1.1376>.

⁴ Ardi Cahya Direja, "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia," *EDUTECH* 16, no. 2 (October 10, 2017): 222, <https://doi.org/10.17509/e.v16i2.7756>.

⁵ Tim Belmawa-Dikti, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi* (Jakarta: Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan Ditjen-Dikti, 2014), 14.

mahasiswa serta untuk meningkatkan level suatu perguruan tinggi dari segala aspek dan lingkungannya.

Dalam praktiknya, tidak semua perguruan tinggi dapat menerapkan kurikulum berbasis KKNI dengan mulus tanpa kendala, baik karena faktor ketidaksiapan secara SDM maupun perangkat yang belum memadai. KKNI sebagai kurikulum baru memang membutuhkan waktu yang lama baik dalam persiapan, penyusunan maupun dalam penerapan kurikulumnya. Sulitnya penyusunan kurikulum berbasis KKNI yang mengacu pada tuntutan dan kebutuhan *stake holder* sehingga diperlukan evaluasi dan peninjauan kembali secara berkala.⁶

Dari penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan kurikulum berbasis KKNI pada Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura dan menemukan signifikansinya dalam rangka pencarian informasi berbasis riset mengenai rekomendasi yang tepat dalam proses penerapan kurikulum berbasis KKNI. Selain itu juga penelitian ini akan memberikan kontribusi tentang sejauh mana keberhasilan kurikulum berbasis KKNI di IAIN Madura sebagai salah satu institusi perguruan tinggi Islam di pulau Madura.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama menjadi pengajar di Prodi TBIN IAIN Madura sejak tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berorientasi KKNI masih belum merata, hal ini bisa dilihat dari penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu SN Dikti masih bertaraf mengisi sesuai format tetapi belum ada esensi pembelajarannya. Penelitian ini meneliti bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN.

Metode Penelitian

Berdasarkan pada konteks dan fokus penelitian, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk melihat, memahami, dan mendeskripsikan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi kemudian mengolah dan menganalisis data untuk dilaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan dalam bentuk data hasil penelitian tentang studi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN IAIN Madura tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

Subjek penelitian disini adalah Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dan para dosen Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini yaitu fakta di lapangan hasil observasi di lingkungan IAIN Madura, ditambah hasil wawancara dengan subjek penelitian sebagai pelaku implementasi kurikulum berbasis KKNI dan terakhir adalah studi dokumen kurikulum yang terkait dengan KKNI berupa profil lembaga, visi misi dan tujuan, struktur kurikulum, RPS, pemetaan mata kuliah, Rancangan Capaian Pembelajaran/LO, Ijazah dan SKPI.

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan 4 tahapan yaitu reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan pengujian reliabilitas dan validitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsep dasar KKNI mengandung makna kesetaraan dan pengakuan yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu KKNI harus dilengkapi dengan mekanisme dan aturan-aturan yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan adanya saling pengakuan. Seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

⁶ Casmini, "Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum BKI Berbasis KKNI," *Jurnal Hisbab* 11, no. 1 (2014): 143.

“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.”

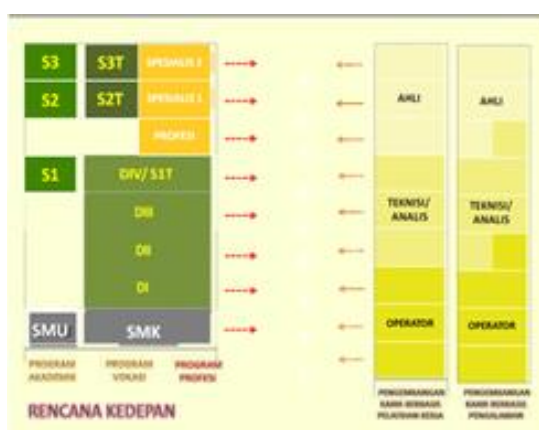
KKNI bertujuan untuk semakin mengarahkan tujuan dari pendidikan yaitu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mumpuni untuk menghadapi dunia kerja. KKNI adalah acuan umum bagaimana kualifikasi seseorang mendapat pengakuan dunia kerja.⁷ Jika pada kurikulum sebelumnya peserta didik diukur sejauh mana mereka bisa mencapai standar kompetensi, maka pada KKNI mengubahnya menjadi Capaian Pembelajaran (CP) atau *learning outcomes*.

Ada tiga strategi yang dianut dalam proses pengembangan KKNI. Pertama, strategi kesetaraan kualifikasi seseorang yang didapat dari pendidikan formal, informal, nonformal, dan juga pengalaman kerja. Kedua, KKNI juga mengakui kualifikasi dari pemegang ijazah yang akan bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar negeri, pertukaran pelajar dan pekerja lintas negara, atau para pekerja di Indonesia yang memiliki ijazah dari luar negeri. Dan yang ketiga, KKNI juga mengakui kesetaraan kualifikasi capaian pembelajaran berbagai bidang keilmuan pada tingkat pendidikan tinggi, baik melalui jalur akademik, vokasi, profesi, serta melalui pengembangan karir yang terjadi di strata kerja, industri, dan asosiasi profesi.⁸

Dalam ranah pendidikan, dunia kerja dan keprofesian, mekanisme dan aturan-aturan tersebut mungkin telah ada dan disusun dengan baik, akan tetapi untuk ranah masyarakat luas hal ini memerlukan panataan yang komprehensif dengan memperhatikan unsur-unsur mutu, akuntabilitas dan integritas. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Untuk lebih mempermudah memahami konsep KKNI, berikut adalah deskripsi KKNI Menurut Perpres No. 8 Tahun 2012.

Gambar 1
Deskripsi KKNI Menurut Perpres No. 8 Tahun 2012⁹



⁷ Imroatus Solikhah, “Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes,” *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching* 12, no. 1 (March 1, 2015): 5, <https://doi.org/10.30957/lingua.v12i1.68>.

⁸ Depdiknas, *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2010).

⁹ Mendikbud, 2010 sebagai mana dikutip Solikhah, “Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes.”

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Penetapan jenjang 1 sampai 9 dilakukan melalui pemetaan komprehensif kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ditinjau dari sisi penghasil (*supply push*) maupun pengguna (*demand pull*) tenaga kerja. Berikut adalah gambar hubungan antara kualifikasi jenjang pendidikan formal 1-9 KKNI dengan pasar kerja sebagai pengguna (*Demand Pull*).

Gambar 2
Hubungan Kualifikasi Lulusan Pendidikan Formal dengan Pasar Kerja



Dari gambar 2 di atas sudah jelas menggambarkan penyelarasan antara kualifikasi pendidikan formal dengan tingkat keahlian pada bidang pekerjaannya. Keterangan dari ke Sembilan jenjang tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰ Lulusan sekolah dasar setara dengan jenjang 1; Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2; Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3; Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4; Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8; dan Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Dari hubungan tersebut kita bisa mengambil contoh seperti ini: Prodi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura adalah program studi yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang kelak akan menjadi guru pendidikan Bahasa Indonesia pada level 6, yaitu level teknis/analisis. Untuk itu untuk mencapai level analisis, setiap program studi harus menentukan profil lulusan yang diharapkan, merekalah yang nantinya bisa memberikan implikasi perkembangan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang tercermin dalam silabus.

Deskripsi pada KKNI terbagi atas dua bagian yaitu deskripsi umum yang mendeskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia dan berlaku pada setiap jenjang, dan deskripsi spesifik yang mendeskripsikan cakupan keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*know-how*), keterampilan (*skill*) dan kompetensi yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.¹¹

¹⁰ Tim Belmawa-Dikti, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*, 6.

¹¹ Tim Belmawa-Dikti, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*.

Deskripsi spesifik terdiri atas empat unsur utama, yaitu (a) keterampilan/keahlian/kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan (kompetensi), (b) cakupan keilmuan/pengetahuan yang dikuasai, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan yang telah dikuasai tersebut, dan (d) kemampuan manajerial serta level otonomi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Setiap jenjang Kualifikasi pada KKNi mencakup proses membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sesuai dengan ideologi dan budaya Bangsa Indonesia, yaitu:¹² Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; Berperan sebagai warga bangsa yang bangga dan cinta tanah air, dan mendukung perdamaian dunia; Mampu bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial dan rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat; Menghargai segala bentuk keanegaramaan (budaya, agama, etnis, pandangan, dan kepercayaan orang lain); dan Menjunjung tinggi penegakan hukum serta senantiasa bersemangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat.

Deskripsi khusus ini adalah deskripsi yang disesuaikan dengan kesembilan jenjang kualifikasi KKNi yang mencakup 4 unsur utama yaitu kompetensi (K), keilmuan/ pengetahuan (P), kemampuan mengaplikasikan ilmu (A), dan kemampuan manajerial (M).

Capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengala-man kerja.¹³

Istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Allan dalam Butcher menjelaskan bahwa banyak terminologi digunakan untuk menjelaskan *Educational Intent*, di antaranya adalah; *learning outcomes; teaching objectives; competencies; behavioural objectives; goals; dan aims*.¹⁴

Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya yang merupakan hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa (spiritual dan sosial) yang didapat dari proses pembelajaran, pengalaman kerja, pengabdian, dan penelitian terkait pembelajaran.

Pengetahuan, merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh dari keseluruhan proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Keterampilan, kemampuan untuk melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh dari keseluruhan proses pembelajaran, pengabdian, penelitian, dan pengalaman kerja yang terkait dengan pembelajaran. Keterampilan ini dibagi menjadi dua yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki setiap lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, sedangkan keterampilan khusus mengacu pada keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.¹⁵

Untuk jenjang program studi S1 Tadris Bahasa Indonesia, maka CPL disesuaikan dengan jenjang kualifikasi sesuai KKNi yaitu pada jenjang 6.¹⁶ Contoh: lulusan S-1 Tadris Bahasa Indonesia harus mampu menjadi guru Bahasa Indonesia yang paham IPTEKS, menguasai materi dan metode

¹² Tim KKNi, "Landasan Hukum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia" (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Mahasiswa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI, 2015), 24.

¹³ Tim Belmawa-Dikti, *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*. 9.

¹⁴ Christopher Butcher, Clara Davies, and Melissa Highton, *Designing Learning: From Module Outline to Effective Teaching* (London: Routledge, 2006).

¹⁵ Tim Belmawa-Dikti.

¹⁶ Binur Panjaitan, Elza I.L. Saragih, and Erna Helena M. Tampubolon, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi KKNi Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Calon Guru," in *Prosiding Lemlit* (Universitas HKBP Nommensen, 2018).

pembelajaran, bisa mengambil keputusan dan memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkannya.

Cara Menyusun Kurikulum Program Studi Berbasis Kkni

Setiap program studi harus terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi dari setiap kurikulum pembelajaran, sehingga kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas.¹⁷ Aspek relevansi yang perlu diperhatikan adalah yaitu aspek kebutuhan, pemahaman yang mendalam tentang program studi tersebut, dan juga kelayakan implementasi KKNI (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012).

Untuk mengembangkan kurikulum yang efektif, perlu dilakukan beberapa proses seperti *need analysis*, studi kelayakan, evaluasi kurikulum yang diterapkan, pelacakan alumni, mengevaluasi evaluasi pembelajaran yang digunakan, pengembangan kurikulum, validasi dan revisi, and tes ke public. Selanjutnya untuk menyusun kurikulum acuannya, program studi harus melibatkan seluruh komunitas akademik, profesional, pengguna alumni, kelompok ahli yang relevan, dan yang tak kalah pentingnya adalah para *stakeholders* lain.¹⁸ Tentunya segala proses tersebut harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dari program studi tersebut, fakultas, universitas, dan juga tujuan pendidikan nasional.

Secara umum, ada beberapa tahapan dalam menyusun kurikulum program studi. Tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi tiga tahapan penting, yaitu tahapan perancangan kurikulum, tahapan perancangan pembelajaran, dan tahap evaluasi program pembelajaran.¹⁹ Setiap tahapan tersebut memiliki tahapan-tahapan yang rinci, penulis mencoba untuk mengikhtisarkan menjadi beberapa tahapan penyusunan kurikulum program studi berbasis KKNI. *Pertama*, menentukan visi, misi, tujuan dari program studi tersebut. Visi adalah tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang yang terbentuk berdasarkan beberapa input dari seluruh pihak akademik program studi. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dicapai atau diimplementasikan sebagai wujud dari elaborasi dari visi yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari program studi tersebut adalah level kualitas (capaian pembelajaran) yang diperoleh oleh masing-masing prodi.

Kedua, untuk mencapai level kualitas dan capaian pembelajaran dari masing-masing program studi, selanjutnya dimasukkan beberapa kemampuan umum yang wajib dimiliki lulusan program studi yaitu *general attitudes (sikap)*, *general knowledge (pengetahuan)*, dan *general skills (kemampuan)* yang dikonstruksi berdasarkan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ketiga, peta kurikulum harus dirancang dalam bentuk sebuah matriks yang menghubungkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan pemilihan bahan kajian. Formulasi dari peta kurikulum ini mengacu pada pedoman dari pengembangan kurikulum.

Keempat, setelah peta kurikulum terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan struktur dan konten dari kurikulum tersebut yang terwujud dalam sebuah daftar mata kuliah, alokasi waktu perkuliahan, dan besarnya sks. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri.²⁰

¹⁷ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum* (Bandung: Rosdakarya, 2005).

¹⁸ Fauzan and Latip, "Curriculum Readiness and Program Evaluation in Implementing Indonesian National Qualifications Framework Curriculum (KKNI)."

¹⁹ Menristek Dikti, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. 9.

²⁰ Menristek Dikti.

Kelima, menyusun susunan mata kuliah, mulai dari nama dan kode mata kuliah, bobot, capaian pembelajaran, deskripsi dari materi pembelajaran yang mendukung tercapainya capaian pembelajaran mahasiswa, dan sumber referensi yang digunakan.

Keenam, menyusun aturan terkait dengan beban belajar dan kelulusan yang berisi penjelasan tentang jumlah sistem kredit semester yang harus diambil dan oleh setiap mahasiswa (mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan) yang wajib dilewati mahasiswa pada tiap mata kuliah.

Ketujuh, menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berisi rencana program pembelajaran yang akan dilaksanakan sepanjang satu semester. RPS adalah bagian integral dari sebuah kurikulum program studi berbasis KKNI. Secara skematik, keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3
Tahapan Perancangan Kurikulum ²¹



Perencanaan Implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN

Dalam proses perencanaan implementasi berbasis KKNI, Prodi TBIN melakukan beberapa tahapan. *Pertama*, meninjau ulang dan memperbaiki kurikulum yang ada dengan menyelaraskan dengan Sistem Kredit Semester dan Profil lulusan studi.²² Hal ini sesuai dengan tahapan penyusunan kurikulum KKNI di perguruan tinggi, dimana pada tahap awal perencanaan, prodi harus memperhatikan aspek kebutuhan (*need analysis*), pemahaman yang mendalam tentang prodi, visi dan misi prodi,²³ analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, melakukan evaluasi kurikulum yang sudah diterapkan, dan semua itu dilakukan untuk menghasilkan profil lulusan yang berkualitas (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012).

Kedua, Prodi juga melakukan studi wawasan kebeberapa perguruan tinggi lain untuk mengetahui seluk beluk KKNI. Setidaknya prodi TBIN telah melakukan dua kali studi wawasan, yaitu studi wawasan ke UNESA dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁴ Dari hasil studi wawasan itu, prodi TBIN mengetahui konten-konten KKNI dan juga mendapat pengetahuan awal tentang lampiran kurikulum yang berupa Silabus dan RPS Mata Kuliah. Studi wawasan seperti ini memang harus

²¹ Menristek Dikti.

²² Moh. Hafid Effendy, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI, Direct Interview, April 12, 2019.

²³ Moh Faridi, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI, Direct Interview, April 10, 2019.

²⁴ Effendy, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI.

dilakukan, selain untuk menambah wawasan dan menambah cakrawala berpikir, studi wawasan ini dilakukan untuk belajar langsung dari universitas yang telah lebih dahulu menerapkan KKNi yaitu UNESA yang mulai menerapkan pada tahun 2015 pada prodi Sastra Indonesia,²⁵ dan UIN Syarif Hidayatullah yang sudah menerapkan mulai tahun 2014 bahkan sudah tersusun rapi pada buku pedoman akademik program Strata 1 yang disusun tahun 2015.²⁶

Ketiga, mengadakan workshop tentang KKNi bagi dosen-dosen,²⁷ dan juga mengadakan program pendampingan terhadap dosen dalam proses penyusunan kurikulum KKNi.²⁸ Workshop ini membuat dosen lebih memahami lebih mendalam mengenai istilah-istilah dan seluk beluk KKNi.

Keempat, merancang sebuah kurikulum yang dibuat untuk mencapai *learning outcomes* (capaian pembelajaran), berdasarkan hasil wawancara bahwa dosen sudah memahami bahwa merancang kurikulum harus sesuai dengan capaian pembelajaran.²⁹ Kurikulum yang disusun dalam implementasinya harus mencapai *learning outcomes* yang ditetapkan.³⁰ Yang dimaksud ditetapkan disini adalah bahwa rumusan capaian pembelajaran harus mengacu KKNi, SN DIKTI, Renstra DIKTI.³¹ Misalnya, untuk level S-1 prodi TBIN IAIN Madura harus dapat diselesaikan dalam waktu empat tahun.

Keempat, menyusun kurikulum dan pembelajaran prodi TBIN IAIN Madura yang relevan dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.³² Sesuai buku panduan kurikulum pendidikan tinggi oleh Menristek DIKTI, bahwa bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri.³³ Selain itu, hal yang mungkin perlu dipertimbangkan juga adalah tuntutan *stakeholder*,³⁴ prodi TBIN IAIN Madura harus membenahi dan merespon tuntutan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kelima, mendesain kurikulum KKNi sedemikian rupa supaya lebih efektif dan efisien, serta bersifat menyeluruh. maksud dari tahapan ini adalah kurikulum tersebut mencakup semua rancangan dan komponen kurikulum seperti dasar-dasar dan struktur kurikulum, sebaran mata pelajaran, garis-garis besar program pengajaran, program tahunan/semester, silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), rancangan pengembangan media, sumber dan alat evaluasi.³⁵ Hal ini sesuai dengan tahapan perancangan kurikulum yang disusun Menristek Dikti.³⁶ RPS dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah bagian integral dari perancangan kurikulum KKNi.

Adapun pihak yang terlibat dalam proses perencanaan ini menurut Ka. Prodi, bapak Hafid, terdiri dari Rektor, Wakil Rektor 1, Dekan, Pembantu Dekan 1, LP2M, Kaprodi, Kabag Akademik, dan Kepala Laboratorium Fakultas³⁷. Hal ini sudah sesuai dengan tahapan perancangan kurikulum

²⁵ Agusniar Dian Savitri and Kisyani Laksono, "Kaji Ulang Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum Berbasis KKNi Prodi Sastra Indonesia UNESA," *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching* 13, no. 2 (2017): 215–22.

²⁶ Fadhillah Suralaga, *Pedoman Akademik Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta: Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, 2015), 36.

²⁷ Iswah Adriana, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNi, Direct Interview, April 25, 2019.

²⁸ Usman, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNi, Direct Interview, April 24, 2019.

²⁹ Masyitah Maghfiroh Rizam, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNi, Direct Interview, April 8, 2019.

³⁰ Rizam.

³¹ Menristek Dikti, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*.

³² Rizam, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNi.

³³ Menristek Dikti, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*.

³⁴ Direja, "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia."

³⁵ Hesti Kusumawati, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNi, Direct Interview, April 10, 2019.

³⁶ Menristek Dikti, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*.

³⁷ Effendy, Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNi.

berbasis KKNI dimana perguruan tinggi terutama pihak prodi harus berperan dalam proses perancangan kurikulum terkait dengan capaian pembelajaran prodi terutama pada tataran *pengetahuan* (keluasan & kedalaman sesuai level SN-DIKTI), dan dalam hal *keterampilan khusus*.³⁸

Sumber daya manusia yang disebutkan di atas adalah pihak-pihak yang terlibat dalam tataran perguruan tinggi secara keseluruhan, namun pada tingkatan prodi sendiri beberapa pihak yang juga terlibat dan berperan sangat penting adalah dosen,³⁹ tenaga pendidikan non dosen,⁴⁰ masyarakat (wali mahasiswa), dan mahasiswa.⁴¹ Dosen, dalam konteks perencanaan implementasi kurikulum berbasis KKNI memiliki posisi sentral, mereka adalah pihak penafsir kurikulum yang diterjemahkan ke dalam proses pembelajaran yang dilakukan.⁴² Dosen adalah pihak yang mengerti perkembangan dan capaian pembelajaran mahasiswa di kelas, sehingga mereka wajib terlibat dalam proses perancangan kurikulum. Peran vital dosen dalam perencanaan implementasi kurikulum berbasis KKNI membuat mereka harus benar-benar menguasai konsep kurikulum KKNI tersebut secara menyeluruh dan utuh.

Selain itu tenaga pendidikan berperan dalam mengurus segala macam urusan keadministrasian dan sarana yang diperlukan. Seluruh Tenaga pendidikan di prodi TBIN berada satu kesatuan dengan fakultas. Masyarakat juga berperan dalam memberikan pemikiran tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari lulusan prodi TBIN, sedangkan mahasiswa dalam konteks ini bisa juga berperan sebagai evaluator dari kurikulum yang diajarkan kepada mereka, mereka juga bisa memberikan masukan dan saran melalui dosen tentang kurikulum yang sudah ada.

Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN

Kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN telah diimplementasikan dengan penjelasan sebagai berikut: *pertama*, implementasi KKNI yang dilaksanakan secara garis besar sudah sesuai dengan tahapan perancangan kurikulum yang disusun Menristek Dikti, yaitu: *pertama*, menentukan visi, misi, tujuan dari program studi tersebut. Menurut hasil wawancara, penetapan visi, misi, tujuan dari program studi itu disusun berdasarkan analisis SWOT dan melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, melalui analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan, asosiasi profesi/ keilmuan.⁴³

Kedua, merumuskan “profil lulusan”.⁴⁴ Pada tahapan ini, prodi memasukkan beberapa kemampuan umum yang wajib dimiliki lulusan prodi TBIN yang meliputi *general attitudes* (sikap), *general knowledge* (pengetahuan), dan *general skills* (kemampuan).

Ketiga, penentuan capaian pembelajaran lulusan. Langkah ini menurut Belmawa Ristek Dikti memang harus dilakukan sebagai penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak dan sebagai rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua program studi, juga merupakan pernyataan mutu lulusan.⁴⁵

³⁸ Menristek Dikti, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*.

³⁹ Faridi, *Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI*; Rizam, *Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI*.

⁴⁰ Rizam, *Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI*.

⁴¹ Kusumawati, *Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI*.

⁴² Hendri Purbo Waseso and Muhtar Sofwan Hidayat, “Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi PGMI Unsiq Jawa Tengah,” *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI* 3, no. 1 (August 30, 2017): 33, <https://doi.org/10.19109/jip.v3i1.1376>.

⁴³ Masyitah Maghfiroh Rizam, *Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN*, Direct Interview, April 10, 2019.

⁴⁴ Hesti Kusumawati, *Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN*, Direct Interview, April 12, 2019.

⁴⁵ Belmawa, “Capaian Pembelajaran (CP),” *Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan* (blog), June 14, 2019, <https://belmawa.ristekdikti.go.id/capaian-pembelajaran-cp/>.

Keempat, prodi TBIN melakukan pemilihan dan menetapkan “bahan kajian” yang akan dipelajari. Bahan kajian dan materi pembelajaran menurut Menristek Dikti dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri.⁴⁶ Jadi penyusunan bahan pembelajaran pada prodi TBIN juga bersifat fleksibel, jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kelima. Prodi TBIN menetapkan matakuliah yang akan di ajarkan dalam satu program studi. Susunan mata kuliah, nama, kode, bobot, CP, deskripsi materi perkuliahan, dan sumber referensi masuk pada bahasan penetapan mata kuliah.

Keenam, prodi TBIN menyusun aturan terkait beban belajar dan kelulusan. Bapak Hafid selaku Ka. Prodi menjelaskan bahwa Pelaksanaan KKNI pada awal tahun akademik 2018/2019 sudah berjalan 1 tahun yaitu pada mahasiswa semester 1 dan 2. Beban belajar mahasiswa terdiri dari SKS maksimal yang berjumlah 156 SKS dan SKS minimal sebanyak 144 SKS. Mahasiswa tidak harus menuntaskan semua mata kuliah (MKL) atau mata kuliah penunjang Keprodian, yang wajib dituntaskan yakni MKD, MKP, MKK, dan MKL lainnya unggulan institusi. Di samping itu, mahasiswa wajib menuntaskan MKK keprodian sebanyak 88 SKS, hal itu sebagai syarat bebas beban kuliah untuk pemerograman Proposal dan KPM dengan SKS kumulatif minimal sudah tuntas 105 SKS.⁴⁷

Jadi bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kurikulum KKNI pada Prodi TBIN bisa dikatakan berjalan hampir sebagaimana mestinya, tahapannya dari awal sudah benar, artinya pemahaman dosen terkait implementasi kurikulum KKNI sudah cukup baik, meskipun beberapa dosen masih kebingungan, misalnya mereka belum bisa menyebutkan tahapan pelaksanaan implementasi kurikulum KKNI pada Prodi TBIN dengan tepat. Selain itu para dosen belum menyebutkan pelaksanaan kurikulum KKNI yang terakhir yaitu menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), padahal RPS adalah bagian integral dari sebuah kurikulum program studi berbasis KKNI.

Rumusan Capaian Pembelajaran Supaya Selaras dengan Deskripsi KKNI yang nantinya situangkan ke dalam Rancangan Capaian Pembelajaran/ Learning Outcome dan SKPI

Dalam penyusunan kurikulum KKNI, prodi TBIN telah menyusun perumusan capaian pembelajaran (CP) berdasarkan aturan yang berlaku.⁴⁸ Aturan yang menjadi dasar disini adalah 9 jenjang KKNI yang telah ditetapkan oleh kemenristek Dikti. Untuk prodi TBIN sendiri, jenjang yang harus diikuti adalah jenjang/ level 6 untuk lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana. Capaian pembelajaran tersebut meliputi deskripsi umum dan deskripsi khusus atau yang ka. Prodi menyebutnya dengan istilah deskripsi generik dan deskripsi spesifik. Prodi TBIN sendiri mengikuti deskripsi umum yang disusun oleh Tim KKNI⁴⁹ yaitu yang mencakup proses membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sesuai dengan Ideologi dan budaya Bangsa Indonesia.⁵⁰

Sedangkan untuk deskripsi khusus, prodi TBIN memiliki deskripsi khusus tersendiri yang berbeda dari deskripsi khusus pada prodi Lain. Bapak Ka. Prodi menyebutkan salah satu wujud dari capaian deskripsi khusus adalah SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang berupa hasil

⁴⁶ Menristek Dikti, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*.

⁴⁷ Moh. Hafid Effendy, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN, Direct Interview, April 14, 2019.

⁴⁸ Moh Faridi, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN, Direct Interview, April 12, 2019.

⁴⁹ Effendy, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN.

⁵⁰ Tim KKNI, “Landasan Hukum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,” 24.

UKBI.⁵¹ Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa hasil tes UKBI dijadikan sebagai salah satu bentuk deskripsi khusus capaian pembelajaran pada Prodi TBIN karena UKBI mengukur kompetensi mahasiswa secara menyeluruh berdasarkan empat keterampilan berbahasa. Hasil uji UKBI ini dijadikan syarat bagi mahasiswa untuk bisa mengikuti ujian skripsi.

Penyusunan deskripsi khusus ini memang sifatnya lebih fleksibel, prodi bisa menyusun sendiri deskripsi khusus namun tetap memperhatikan rambu-rambu penyusunan capaian pembelajaran yang disusun Menristek Dikti. Uji UKBI itu sendiri masuk pada tataran “penguasaan pengetahuan”. Uji UKBI menunjukkan dengan jelas bidang/ cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menjadi kekhususan, yaitu kemahiran berbahasa Indonesia. UKBI juga menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, kedalaman pengetahuan yang harus di kuasai (skor UKBI), dan yang terakhir UKBI juga memiliki kesetaraan dengan standar isi pembelajaran dalam SN DIKTI (Unsur Pengetahuan, Jenjang 6).⁵²

Selain itu ibu Hesti juga menyebutkan bahwa rumusan capaian pembelajaran prodi TBIN disusun berdasarkan 4 unsur yaitu sikap, tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, wewenang dan tanggung jawab.⁵³ 4 unsur tersebut sesuai dengan deskriptor generik capaian pembelajaran dalam KKNi⁵⁴ 4 unsur pada Prodi TBIN seharusnya mengikuti 4 unsur yang berada pada jenjang 6 (Diploma 4/ Sarjana), yaitu: Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah; Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural; Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi; dan Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, peneliti hanya menemukan contoh satu unsur saja yang telah dilaksanakan oleh prodi TBIN yaitu UKBI untuk mengukur unsur “penguasaan pengetahuan” (unsur nomor 2), sedangkan untuk unsur lainnya belum ditemukan contoh wujud pelaksanaannya. Padahal capaian pembelajaran harus mencakup 4 unsur tersebut. Dalam menyusun capaian pembelajaran, prodi TBIN seharusnya tidak hanya fokus pada “penguasaan pengetahuan” saja, namun juga harus fokus pada “kemampuan kerja” sesuai dengan program studi, kemampuan kerja tersebut bisa digali dari profil lulusan, standar yang tersedia, daftar kompetensi, dan kurikulum.⁵⁵

Tingkat Keberhasilan yang dicapai terkait Pelaksanaan Implementasi Kurikulum KKNi yang dilakukan pada Prodi TBIN

Tingkat keberhasilan yang dicapai terkait pelaksanaan implementasi kurikulum KKNi menghasilkan respon yang berbeda-beda. Beberapa dosen menyebutnya telah berhasil,⁵⁶ namun

⁵¹ Effendy, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi pada Prodi TBIN.

⁵² Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, “Rambu-Rambu Penyusunan Capaian Pembelajaran,” (Power Point Presentation, 2017), <http://cp.ristekdikti.go.id/file/LAMPIRAN%20I%20RAMBU%20PENYUSUNAN%20CP%20-%20I%20JUNI%202017.pdf>.

⁵³ Kusumawati, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi pada Prodi TBIN.

⁵⁴ Belmawa, “Capaian Pembelajaran (CP).”

⁵⁵ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, “Rambu-Rambu Penyusunan Capaian Pembelajaran.”

⁵⁶ Faridi, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi pada Prodi TBIN; Rizam, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi pada Prodi TBIN.

mayoritas dosen sependapat bahwa pelaksanaan implementasi kurikulum KKNI yang dilakukan pada Prodi TBIN IAIN Madura belum maksimal.

Beberapa penyebab belum maksimalnya pelaksanaan implementasi kurikulum KKNI yang dilakukan pada Prodi TBIN adalah: *pertama*, waktu implementasi yang masih terbilang baru, implementasi KKNI prodi TBIN masih proses awal, masih belum maksimal sehingga perlu disempurnakan hingga batas maksimal sesuai dengan institusi yang diinginkan.⁵⁷ Selain itu, pelaksanaan implementasi kurikulum KKNI yang dilakukan sangat sulit untuk dinilai tingkat keberhasilannya karena masih berjalan satu tahun, mahasiswa TBIN IAIN Madura belum menembuh program Praktik Mengajar 2 dan proposal skripsi.⁵⁸

Hal itu sangat wajar apabila pelaksanaan implementasi KKNI pada prodi TBIN IAIN Madura masih belum maksimal, karena pelaksanaannya yang masih baru berjalan 1 tahun. Faktor lain yaitu kurangnya kesiapan dosen prodi TBIN dalam melaksanakan kurikulum KKNI, penyebab dikarenakan kurangnya sosialisasi kurikulum KKNI.⁵⁹ Sebagai kurikulum baru, sosialisasi mengenai KKNI harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, agar semua dosen bisa memahami dan mampu mengimplementasikan KKNI dengan baik.

Serangkaian evaluasi terhadap implementasi kurikulum berbasis KKNI sudah dilakukan oleh prodi TBIN IAIN Madura. *Pertama*, dilakukannya peninjauan kembali terhadap deskripsi mata kuliah untuk kemudian diseleraskan dan ditelaah oleh dosen Tadris Bahasa Indonesia.⁶⁰ *Kedua*, melakukan sinkronisasi konten isi kurikulum KKNI terutama pada visi, misi, tujuan, sasaran dan target terutama karena berkaitan dengan proses transformasi status dari STAIN menjadi IAIN.⁶¹ Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menyusun matriks antara CPL dengan mata kuliah, mata kuliah yang tidak ada keterkaitan dengan CPL dihapus.⁶² Selain itu juga evaluasi juga dilakukan dengan cara melakukan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Mahasiswa juga berperan dalam proses evaluasi kurikulum pada prodi TBIN IAIN Madura.

Pada tataran evaluasi kurikulum berbasis KKNI, program studi Tadris Bahasa Indonesia IAIN Madura belum melakukan kegiatan evaluasi secara menyeluruh dan sistematis. Prodi TBIN hanya melakukan evaluasi pada konteks kurikulum sebagai sebuah pembelajaran dan pengajaran saja, yaitu hanya fokus pada penyesuaian mata kuliah dengan capaian pembelajaran, belum secara menyeluruh pada perangkat kurikulum secara keseluruhan.

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Beauchamp dalam Direja⁶³ bahwa langkah evaluasi kurikulum mencakup empat hal, yaitu: Evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru; Evaluasi desain kurikulum; Evaluasi hasil belajar siswa; dan Evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Data yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum, serta prinsip-prinsip melaksanakannya.

⁵⁷ Usman, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN, Direct Interview, April 24, 2019.

⁵⁸ Iswah Adriana, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN, Direct Interview, April 25, 2019; Effendy, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN.

⁵⁹ Kusumawati, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN.

⁶⁰ Moh. Hafid Effendy, Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN, Direct Interview, April 14, 2019.

⁶¹ Effendy.

⁶² Masyitah Maghfiroh Rizam, Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN, Direct Interview, April 10, 2019.

⁶³ Direja, "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia."

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN. setidaknya ada 10 faktor yang mempengaruhi, diantaranya: Kompetensi bidang kebahasaan dan kesastraan pada dosen perlu ditingkatkan; Penggunaan media pembelajaran IT pada dosen masih lemah; Anggaran yang disiapkan oleh fakultas masih rendah; Kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) masih belum optimal; Kurangnya pengabdian masyarakat baik dari dosen maupun dari mahasiswa; Minimnya bakat mahasiswa untuk meraih prestasi; Kurangnya pemahaman dosen terhadap konten KKNI⁶⁴; Kurangnya pendampingan ahli KKNI⁶⁵; Sarana dan Prasarana kurang mendukung⁶⁶; Komitmen bersama semua pihak termasuk dosen prodi dan mahasiswa; dan 10 faktor tersebut kemudian dibagi menjadi 3 tahapan, yang pertama:

Pada tahapan penyusunan kurikulum, kendala yang paling mendasar adalah kurangnya pendampingan ahli KKNI dalam proses penyusunan dokumen kurikulum yang dihasilkan menjadi tidak sempurna. Prodi TBIN sebenarnya pernah sekali mendatangkan ahli KKNI, yaitu professor Sukarno, namun pelaksanaan yang hanya satu hari terasa sangat kurang, sehingga dosen belum bisa menyusun kurikulum berbasis KKNI dengan sempurna.

Kendala yang dihadapi pada tahapan ini diantaranya penggunaan media pembelajaran IT pada dosen masih lemah, kurangnya pemahaman dosen terhadap konten KKNI. Faktor tersebut berakibat pada ketidaksiapan dosen dalam melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan kurikulum KKNI. Oleh karena itu, pendampingan dan sosialisasi terhadap dosen sangat perlu dilakukan, sehingga mereka benar-benar siap dalam menerapkan kurikulum berbasis KKNI.

Dari segi faktor pendukungnya, pihak kampus sudah pernah mendatangkan ahli KKNI dan sudah menyediakan anggaran terkait penerapan kurikulum berbasis KKNI. Namun, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan data bahwa sarana dan prasarana, ruang kelas dan laboratorium bahasa sudah tersedia, namun masih kurang mendukung.

Pelaksanaan Kurikulum pada prodi TBIN masih terkesan berjalan apa adanya, hal ini adalah dampak lanjutan dari kendala-kendala yang sebelumnya. Kurangnya pendampingan pada saat penyusunan berdampak pada pelaksanaan kurikulum KKNI pada Prodi TBIN masih belum maksimal, masih terasa sebagai sebuah uji coba.

Penutup

Dalam proses perencanaan implementasi berbasis KKNI, Prodi TBIN melakukan beberapa tahapan diantaranya: peninjauan ulang dan memperbaiki kurikulum yang sudah ada, melakukan prodi wawasan ke beberapa perguruan tinggi, mengadakan workshop dan program pendampingan terhadap dosen dalam penyusunan kurikulum KKNI, merancang sebuah kurikulum untuk mencapai *learning outcomes* (capaian pembelajaran), dan mendesain kurikulum KKNI sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tersebut adalah Rektor, Wakil Rektor 1, Dekan, Pembantu Dekan 1, LP2M, Kaprodi, Kabag Akademik, Kepala Laboratorium Fakultas, dosen, dan mahasiswa.

Pelaksanaan implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN bisa dikatakan berjalan hampir sebagaimana mestinya. Capaian pembelajaran disusun mengikuti jenjang/ level 6 untuk

⁶⁴ Effendy, Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN.

⁶⁵ Rizam, Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN; Adriana, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN

⁶⁶ Usman, Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN.

lulusan Diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana yang meliputi deskripsi umum dan deskripsi khusus, sesuai dengan profil lulusan prodi TBIN. Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN masih pada konteks kurikulum sebagai sebuah pembelajaran dan pengajaran saja belum secara menyeluruh pada perangkat kurikulum secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KKNI di Prodi TBIN diantaranya: masih lemahnya penggunaan media pembelajaran IT pada dosen, kurangnya pengabdian masyarakat baik dari dosen maupun dari mahasiswa, kurangnya pemahaman dosen terhadap konten KKNI, kurangnya pendampingan ahli KKNI, sarana dan Prasarana kurang mendukung, dan juga komitmen bersama semua pihak termasuk dosen prodi dan mahasiswa.

Kepada pihak Institusi memberikan dukungan yang maksimal terhadap penyelenggaraan kurikulum KKNI di prodi TBIN, terutama terkait kelengkapan sarana dan prasarana, pengadaan workshop dan pelatihan terkait KKNI. Prodi TBIN harus senantiasa terus mengembangkan perangkat kurikulum khususnya yang berbasis KKNI, baik itu pada tahap perencanaannya, pelaksanaannya, merumuskan capaian pembelajarannya, penyusunan RPS dan SKP, dan perangkat kurikulum lainnya. Karena, hampir disemua tahapan pelaksanaan kurikulum KKNI, prodi TBIN masih menghadapi banyak kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Belmawa. "Capaian Pembelajaran (CP)." Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan (blog), June 14, 2019. <https://belmawa.ristekdikti.go.id/capaian-pembelajaran-cp/>.
- Butcher, Christopher, Clara Davies, and Melissa Highton. *Designing Learning: From Module Outline to Effective Teaching*. London: Routledge, 2006.
- Casmini. "Evaluasi Dan Peninjauan Kurikulum BKI Berbasis KKNI." *Jurnal Hisbah* 11, no. 1 (2014): 120–44.
- Depdiknas. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2010.
- Direja, Ardi Cahya. "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia." *EDUTECH* 16, no. 2 (October 10, 2017): 222. <https://doi.org/10.17509/e.v16i2.7756>.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI Dan SN-Dikti*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.
- Fauzan, and Asep Ediana Latip. "Curriculum Readiness and Program Evaluation in Implementing Indonesian National Qualifications Framework Curriculum (KKNI)." *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society* 2, no. 2 (2015): 191–203. <http://dxdoi.org/10.15408/tjems.v2i2.3179>.
- Hasan, Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Hasanah, Nur. "Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Kurikulum Berbasis KKNI (Studi Kasus Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Ambon)." *Fikratuna* 6, no. 2 (2014). <http://dx.doi.org/10.19109/jip.v3i1.1376>.
- Jono, Ali Akbar. "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu." *MANHAJ: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2016).
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. "Rambu-Rambu Penyusunan Capaian Pembelajaran." Power Point Presentation, 2017.

- <http://cp.ristekdikti.go.id/file/LAMPIRAN%20I%20RAMBU%20PENYUSUNAN%20CP%20-%20I%20JUNI%202017.pdf>.
- Menristek Dikti. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, 2016.
- Panjaitan, Binur, Elza I.L. Saragih, and Erna Helena M. Tampubolon. "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi KKNI Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Calon Guru." In *Prosiding Lemlit*. Universitas HKBP Nommensen, 2018.
- Savitri, Agusniar Dian, and Kisyani Laksono. "Kaji Ulang Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum Berbasis KKNI Prodi Sastra Indonesia UNESA." *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching* 13, no. 2 (2017): 215–22.
- Solikhah, Imroatus. "Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes." *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching* 12, no. 1 (March 1, 2015): 1–22. <https://doi.org/10.30957/lingua.v12i1.68>.
- Suralaga, Fadhilah. *Pedoman Akademik Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama, 2015.
- Tim Belmawa-Dikti. *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran & Kemahasiswaan Ditjen-Dikti, 2014.
- Tim KKNI. "Landasan Hukum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia." Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI, 2015.
- Waseso, Hendri Purbo, and Muhtar Sofwan Hidayat. "Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi PGMI Unsiq Jawa Tengah." *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI* 3, no. 1 (August 30, 2017): 33. <https://doi.org/10.19109/jip.v3i1.1376>.

Sumber Interview:

- Adriana, Iswah. Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 25, 2019.
- . Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI. Direct Interview, April 25, 2019.
- Effendy, Moh. Hafid. Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 14, 2019.
- . Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 14, 2019.
- . Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI. Direct Interview, April 12, 2019.
- Faridi, Moh. Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 12, 2019.
- . Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 12, 2019.
- . Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI. Direct Interview, April 10, 2019.
- Kusumawati, Hesti. Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 12, 2019.
- . Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 12, 2019.
- . Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI. Direct Interview, April 10, 2019.
- Rizam, Masyitah Maghfiroh. Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 10, 2019.

Aflabab

- . Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 10, 2019.
- . Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI. Direct Interview, April 8, 2019.
- Usman. Evaluasi implementasi kurikulum berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 24, 2019.
- . Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Prodi TBIN. Direct Interview, April 24, 2019.
- . Perencanaan Kurikulum Berbasis KKNI. Direct Interview, April 24, 2019.